

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas keuangan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Maka dari itu, prinsip ini menuntut pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap bentuk pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik secara terbuka, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas keuangan tidak hanya sebatas penyusun dan penyampaian laporan keuangan saja, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola anggaran secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan penerapan akuntabilitas yang kuat, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan publik, lalu bisa meningkatkan integrasi birokrasi, serta menciptakan transparan (BPK RI, 2025).

Dalam praktiknya penerapan akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah masih menghadapi berbagai persoalan yang mendasar. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024, sekitar 60% temuan audit terhadap pemerintah daerah di Indonesia masih berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut mencakup penggunaan anggaran yang tepat sasaran, kesalahan dalam pencatatan aset, hingga ini membuat keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Meskipun Sebagian besar pemerintah daerah telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP), pencapaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas akuntabilitas keuangan yang sesungguhnya.

Hasil ini menunjukkan bahwa WTP tidak selalu tidak selalu menjadi penanda pasti menjadi kualitas pengelolaan keuangan yang baik, karena diperlukan upaya untuk memperkuat sistem, meningkatkan kemampuan para pelaksana, serta memastikan prinsip transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat di setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi ini juga terjadi di Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan laporan resmi, Kota Tasikmalaya ini kembali mempertahankan opini WTP untuk kesembilan kalinya dan bahkan menerbitkan peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi sebagai langkah penguatan kerangka akuntansi dan transparansi pelaporan keuangan (Peraturan.bpk.go.id,2025).

Namun, masih dapat tantangan khususnya pada tingkat SKPD. Misalnya pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2024. Ditemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran bahan bakar (BBM) senilai sekitar 1,4 miliar sehingga ditemukannya penyimpangan keuangan. Maka dari itu, penting untuk pengawasan internal di level SKPD Kota Tasikmalaya sehingga diperlukannya untuk memperkuat agar tidak terjadi untuk kesekian kalinya dalam penyimpangan keuangan (Priangan.com).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa akuntabilitas keuangan di Kota Tasikmalaya berada dalam posisi *relative* baik karena telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian namun belum optimal karena masih ada temuan dalam

ketidaksesuaian dalam menggunakan BBM. Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pelaporan keuangan akuntabel, namun di tingkat operasional SKPD masih terdapat kelemahan pengendalian internal serta keterbatasan penerapan sistem *e-Government* yang dapat mendukung proses pelaporan secara efisien dan transparan. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penerapan *e-Government* berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas keuangan SKPD Kota Tasikmalaya, sebagai dasar untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

untuk mengatasi masalah itu, perlunya pemerintah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mana ini sudah di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkelanjutan di instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. . SPIP ini juga pada dasarnya yaitu proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di instansi pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik. Melalui SPIP, pemerintah berusaha untuk memastikan kegiatan ini bisa di percaya, aset negara terlindungi, dan semua aktivitas sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023), rata-rata indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) daerah di Indonesia berada pada level 2,06, yang termasuk dalam kategori “terdefinisi”. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah sudah di terapkan, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam mendukung akuntabilitas keuangan. Jika dilihat secara regional, provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata maturitas sebesar 3,18, dan Tasikmalaya juga meraih nilai 3,14 dengan kategori yang sama, yaitu “terdefinisi” (BPKP,2023).

Capaian tersebut menandakan bahwa penerapan SPIP di Kota Tasikmalaya telah berjalan cukup baik dan berada di atas rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik. Maka dari itu perlunya pemantapan dan optimal dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan di Kota Tasikmalaya.

Lalu, menurut Fadil Asri et al., (2023:18) SPIP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah karena penerapan SPIP yang baik mampu memastikan setiap proses pengelolaan keuangan berjalan efektif, efisien, patuh aturan, serta menghasilkan laporan yang andal. Ketika seluruh unsur organisasi menjalankan SPIP secara konsisten, sistem ini memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi tercapai melalui pengamanan aset, ketepatan pelaporan, dan kepatuhan pada peraturan, sehingga pertanggungjawaban keuangan

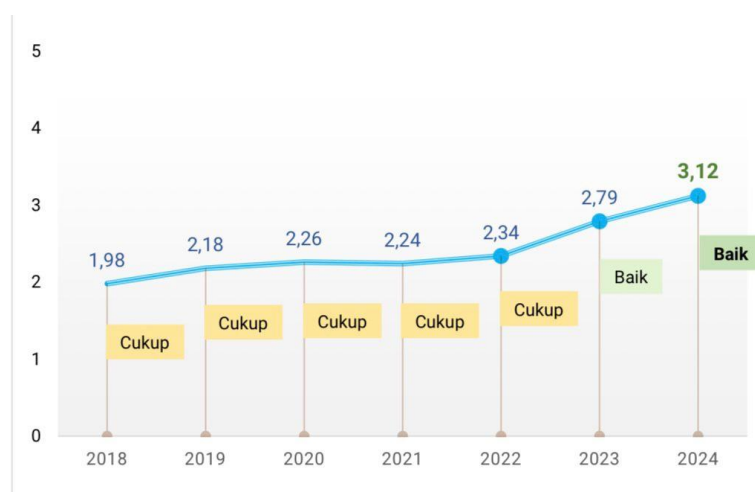
menjadi lebih jelas, transparan, dan dapat dipercaya. Menurut Djamil, (2023: 76) menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern memberikan dorongan positif bagi akuntabilitas keuangan. Ketika pengendalian intern dijalankan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan setiap aktivitas organisasi menjadi lebih terarah, terukur, dan sesuai prosedur. Hal ini membuat risiko kesalahan dapat diminimalkan, penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien, serta hasil kerja lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Namun, hasil penelitian Ferlia et al (2023:105) menunjukkan temuan yang sedikit berbeda. Penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas SPIP dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh apabila tidak didukung oleh komitmen pegawai dan budaya organisasi yang mendukung pengawasan internal. Dengan kata lain, meskipun sistem pengendalian internal telah diterapkan dengan baik, akan menjadi terbatas atau bahkan tidak signifikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan SPIP tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur formal, tetapi juga sangat bergantung pada faktor sumber daya manusia dan lingkungan organisasi yang mendukung terciptanya pengawasan internal yang efektif.

Selain pengendalian internal, faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan adalah *e-Government* atau dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Yang Di mana ini sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, SPBE ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel yang di mana ini melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.

Dengan menggunakan penerapan SPBE, proses administrasi dan pelaporan keuangan daerah ini data dilakukan secara digital, sehingga risiko kesalahan dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Selain itu, SPBE ini juga bisa memudahkan *monitoring* dan evaluasi kegiatan pemerintah, sehingga ini mempercepat aliran informasi, serta ini juga meningkatkan keterbukaan data kepada publik. Dengan kata lain, SBPE tidak hanya mempermudah untuk pengelolaan keuangan saja, tetapi ini juga menjadi saran penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Perkembangan tingkat implementasi *e-Government* dari tahun 2018 hingga 2024 dapat diamati pada gambar di bawah ini. Grafik ini menggambarkan peningkatan nilai indeks *e-Government* setiap tahun, yang menunjukkan kemajuan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pemerintahan.



**Gambar 1.1** KemenPAN-RB (2024)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dilihat bahwa Indeks SPBE Nasional mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2018, nilai indeks SPBE nasional berada di angka 1,98 dengan kategori “cukup”, kemudian meningkat menjadi 2,18 pada tahun 2019, 2,26 pada tahun 2020, 2,24, pada tahun 2021 dan 2,34 pada tahun 2022 yang masih termasuk dalam kategori “cukup”. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai indeks SPBE nasional naik cukup signifikan menjadi 2,79 dengan kategori “baik”, sehingga akhirnya pada tahun 2024 mencapai 3,12 yang tetap berada pada kategori “baik”.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah di Indonesia secara bertahap telah berhasil memperkuat penerapan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi SPBE yang semakin matang mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek tata kelola, pelayanan publik berbasis teknologi, serta efektivitas koordinasi antar instansi pemerintah.

meskipun secara nasional capaian indeks SPBE menunjukkan tren positif, tingkat penerapannya belum merata di seluruh daerah. Beberapa pemerintah daerah, termasuk Kota Tasikmalaya masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi sistem, infrastruktur digital, serta kompetensi aparatur yang belum optimal.

Oleh karena itu, meskipun nilai SPBE nasional sudah berada pada kategori “baik”, evaluasi terhadap efektivitas penerapannya di tingkat daerah tetap penting dilakukan untuk memastikan bahwa digitalisasi pemerintahan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Menurut Nurindahsari, (2022:124) E-Government berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemerintahan membuat alur pengelolaan keuangan menjadi lebih terbuka, terstruktur, dan mudah diawasi. Melalui E-Government, setiap transaksi dan pencatatan keuangan terekam secara otomatis sehingga mengurangi peluang manipulasi, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan ketepatan dan keandalan data yang digunakan dalam pelaporan.

Temuan ini diperkuat oleh Bao et al (2024:103), yang menyatakan bahwa penerapan sistem elektronik dalam administrasi publik tidak hanya mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan saja, tetapi juga ini untuk memperkuat jejak audit. Dengan kata lain juga, penggunaan teknologi ini membuat informasi secara terintegrasi dalam pemerintahan yang di mana ini membuat laporan keuangan lebih cepat, akurat, dan mudah di audit, sehingga akuntabilitas publik dapat ditingkatkan secara signifikan.

Namun, hasil penelitian yang berbeda yang mana ini ditunjukkan oleh Omposunggu et al (2019:109), yang menyatakan bahwa penerapan *e-Government* ini tidak selalu efektif jika masih terdapat keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem digital.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya *research gap* yang perlu di kaji lebih lanjut, yaitu sejauh mana penerapan SPIP dan *e-Government* (SPBE) ini dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan agar memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh faktor tersebut terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan di SKPD Kota Tasikmalaya. Dengan

demikian, hasil penelitian tidak hanya menambah pemahaman teoritis saja, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengendalian internal dan digitalisasi sistem administrasi keuangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kedua aspek tersebut secara sinergis agar prinsip akuntabilitas keuangan dapat terwujud secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penerapan *e-Government* terhadap akuntabilitas keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, *e-Government*, dan Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Kota Tasikmalaya
2. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Kota Tasikmalaya
3. Bagaimana pengaruh *e-Government* terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Kota Tasikmalaya.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, *e-Government*, dan Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh *e-Government* terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Kota Tasikmalaya.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan *e-Government* terhadap akuntabilitas keuangan. Lalu bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama pada konteks pemerintahan daerah atau instansi publik lainnya. Dan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan hubungan antara sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

##### **1.4.2 Kegunaan praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak. Untuk Pemerintah Daerah, terutama SKPD Kota Tasikmalaya, penelitian ini bisa menjadi acuan untuk mengevaluasi dan memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta memperbaiki penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pada aspek pengawasan internal dan pengelolaan risiko. Bagi Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil penelitian ini bisa memberikan tambahan informasi dalam melakukan pembinaan dan penilaian terhadap penerapan SPIP di pemerintah daerah, terutama terkait fungsi pengawasan dan pengendalian risiko.

Bagi akademis dan mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan referensi atau penelitian empiris dibidang akuntansi pemerintahan untuk kegiatan akademik atau penelitian selanjutnya. Selain itu, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bahwa penerapan sistem pengendalian internal dan *e-Government* yang baik mampu memperkuat pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan publik.

## **1.5 Lokasi**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya merupakan salah satu pemerintah daerah yang sedang berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*.